

**DINAMIKA POLITIK REZIM ORDE BARU DI INDONESIA  
STUDI TENTANG KEGAGALAN KONSOLIDASI POLITIK REZIM ORDE BARU PADA  
TAHUN 1990-1996**

*POLITICAL DYNAMICS OF NEW ORDER REGIME IN INDONESIA  
STUDIES ABOUT A FAILURE OF POLITICAL CONSOLIDATION NEW ORDER REGIME  
IN YEAR 1990-1996*

**Sivfian Hendra Legowo, IG. Krisnadi, Hendro Sumartono**

Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember (UNEJ)

Jln. Kalimantan 37, Jember 68121

*E-mail: ignatus.krisnadi@gmail.com*

**ABSTRAK**

Artikel ini berisi pembahasan mengenai rezim Orde Baru pada tahun 1990-1996. Berjayanya Orde Baru selama 32 tahun disebabkan karena kekuatan politik yang didapatkan dari proses konsolidasi politik mulai rezim ini muncul. Orde Baru memperoleh kejayaannya sejak era 1970-an, ditandai dengan penyelesaian Peristiwa Malari pada tahun 1974 oleh kekuatan militer dan jaringan politik Suharto lainnya. Memasuki era 1990-an, proses konsolidasi yang telah mapan sebelumnya menjadi berantakan dan berujung pada transisi rezim Orde Baru pada tahun 1998. Oleh karena itu, dinamika politik yang terjadi pada era pratransi menjadi permasalahan utama untuk melakukan kajian ini. Peneliti skripsi ini menggugurkan metode sejarah melalui empat tahapan meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Kajian skripsi yang berbasis kebijakan politik nasional yang terkandung dalam strategi politik Orde Baru telah banyak diteliti di dalam teks buku, artikel dan surat kabar, oleh karenanya penelitian dalam skripsi ini lebih memakai studi pustaka. Perkembangan politik era pratransi ditandai dengan gerakan prodemokrasi dan hak asasi manusia yang ternyata menuntut rezim Orde Baru untuk melakukan inovasi dalam strategi politiknya. Sistem otoriter dan tindakan represif rezim Orde Baru, ternyata malah membuat soliditas gerakan oposisi makin mapan. Bahkan, stigma komunis yang menjadi struktur ide Orde Baru paling ampuh, telah terdistorsi melawan arus demokrasi dan hak asasi manusia. Akhirnya, hampir semua strategi politik Orde Baru malah membuat gerakan oposisi makin kuat dengan adanya musuh bersama yang harus ditumbangkan.

**Kata Kunci : Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Konsolidasi Politik, Orde Baru.**

**ABSTRACT**

*This thesis consists of a discussion of New Orde of rezim in 1990-1996. In its walk almost 32 years is caused by the politic's strength that was got from consolidation process of politick that was come up. New Orde got its rich since inte 1970s, that was clude by the over of the Malari event in the 1974 whitt the military strength and politics of Suharto. In the beginning of 1990s, consolidation that was appropri ate before became break and anded in the rezim transition in New Orde 1998.thus politics happened in prantransition era become the first problem to review, remembering this review basically about on how wise the politics in New Orde, include looking the implication to word the politics condition, this the writer uses literary review. The development of era prantransition was clued by prodemocracy and human right that was in the New Orde for doing innovation in their strategy. Otoriter system and new Orde reim made solidity of opposition became better. Even the comunism's stigma that was the most powerful in New Orde to fight for democracy and human right. Finally, most of the strategy made oposition stronger.*

**Keywords: Democracy, Human Rights, New Orde, Political Consolidation.**

## 1. Pendahuluan

Pada dasarnya, membicarakan rezim Orde Baru tidak akan pernah ada habisnya. Kekuatan politik yang dimiliki oleh rezim ini mau tidak mau harus kita acungi jempol karena kedigjayaannya, terlepas dari banyaknya kritik tajam, bahkan mulai rezim ini berkuasa. Naiknya Suharto menjadi Presiden Republik Indonesia ke-2 setelah Sukarno, secara otomatis mengantarkan Indonesia menuju rezim yang baru dan kemudian dikenal dengan istilah Orde Baru (Friedel, 1991:455-456).

Sejak awal Orde Baru, ekonomi telah menjadi panglima menggantikan politik yang pada masa Sukarno dianggap sebagai panglima (Tirtosudarmo, 2010:19). Watak anti partai politik yang diterapkan Orde Baru dapat menunjukkan bahwa rezim ini lebih memilih untuk menjamin keberlangsungan pertumbuhan ekonomi dengan mengesampingkan masalah politik dalam masyarakat. Terwujudnya paham seperti itu juga tidak terlepas dari bagaimana peran para ekonom-teknokrat yang memprakarsai *Pembangunanisme* pada rezim Orde baru. Mereka berpendapat bahwa politik harus dikesampingkan dahulu untuk memberi kesempatan pada pembangunan.

Proses dalam mewujudkan stabilitas politik, rezim Orde Baru tidak hanya berhenti pada tataran penghisapan kekuatan-kekuatan partai ke dalam tubuh pemerintah, yaitu dengan munculnya 3 partai yakni Golkar, PDI, PPP. Akan tetapi, tindakan penyeragaman asas dengan menggunakan Pancasila menjadi pilihan selanjutnya bagi Presiden Suharto dan para petinggi Orde Baru. Maka gagasan penyeragaman asas partai-partai politik dan organisasi-organisasi sosial-keagamaan dilaksanakan. Gagasan penyeragaman asas yang pada mulanya terbatas pada partai-partai politik, kemudian berkembang atau mengena pada organisasi-organisasi sosial-budaya dan keagamaan lainnya, bahkan pada area pelajar dan mahasiswa.

Dari sekian banyak penelitian yang mengkaji runtuhnya rezim Orde Baru, kebanyakan kajian tersebut fokus kepada proses transisi rezim. Akan tetapi, kajian yang fokus terhadap fase pratransi masih sedikit yang pernah dilakukan. Padahal, fase pratransi ini merupakan fase penting, dimana fase inilah yang akan menentukan karakter dari transisi demokratis di masa mendatang. Apakah setelah transisi rezim terjadi,

maka akan lebih demokratis, ataukah rezim yang akan lahir malah berbalik menjadi rezim yang lebih otoriter.

Pada lingkup temporal, penulis memilih untuk mengambil tahun 1990-1996. Pada tahun 1990, mulai marak gerakan-gerakan oposisi yang mulai merubah wajah politik Indonesia. Gerakan oposisi baru yang mulai lahir dan berkembang pada era ini berbeda dengan gerakan sebelumnya, mereka tidak lagi mempan untuk diserang dengan senjata rezim (represifitas, stigma pemberontak dan komunisme) untun meredakannya, isu demokrasi dan hak asasi manusia menjadi ciri khas dari gerakan ini. Apalagi, dari pihak pemerintah pada awal 1990-an mengeluarkan kebijakan politik yang dikenal dengan "politik keterbukaan". Maka dari itu, tahun 1990 merupakan tahun yang sangat tepat untuk meneliti dinamika politik Orde Baru yang mengakibatkan runtuhnya rezim ini.

Batasan tahun dibatasi pada tahun 1996. Tahun 1996 adalah tahun yang menandakan akan soliditas dan kebersamaan gerakan oposisi dalam perlawanannya terhadap rezim. Tindakan politik rezim berupa penindasan dan kekerasan ternyata malah membuat golongan oposisi makin solid dalam gerakannya. Terbukti dengan tingkat kerjasama yang merata dari semua gerakan oposisi yang ada, mereka sepakat bahwa demokrasi dan hak asasi manusia harus ditegakkan di Indonesia dan mengakhiri otoritas rezim Orde Baru. Pada tahun 1996 juga merupakan tahun batasan isu politik yang terjadi. Menginjak tahun 1997 keatas, isu yang dibawa untuk melawan rezim sudah berubah menjadi isu ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Oleh karenanya, tahun 1996 dipakai untuk batasan, karena awal dari pemersatu kekuatan gerakan oposisi adalah mulai tahun 1990-1996, baik itu pekaru isu yang dibawa maupun pekaru soliditas gerakan.

Dari sekian latar belakang kajian penelitian ini, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagaiberikut : 1). Bagaimana Rezim Orde Baru melakukan konsolidasi politiknya ? 2). Bagaimana pengaruh arus demokrasi terhadap konsolidasi politik Orde Baru ? 3). Bagaimana proses gagalnya konsolidasi politik Orde Baru ? Lingkup kajian yang dipakai oleh penulis adalah kajian sejarah politik. Pemilihan kajian ini didasarkan pada jenis kajian

yang telah dipilih. Strategi politik merupakan faktor penting untuk melihat perkembangan politik suatu kekuatan. Oleh karena itu, untuk melihat kekuatan politik Orde Baru pada masa-masa akhir ia memerintah, konteks dinamika politik menjadi penting untuk dilihat.

Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan beberapa tinjauan pustaka untuk menunjukkan keotentika dari penelitian. Asvi Warman Adam dalam buku berjudul *Suharto File, Sisi Gelap Sejarah Indonesia* menjelaskan bagaimana Suharto sebagai jenderal politik Indonesia yang pada waktu itu berperan aktif dan optimal dalam terselenggaranya rezim otoriter yang ada (Adam, 2010:71). Penilaian Asvi dalam suatu rezim yakni Orde baru melalui objek Suharto membuat perbedaan dengan penelitian ini menjadi nyata. Kajian skripsi ini menilai pandangan kajian rezim Orde Baru melalui objek konsolidasi rezim, pemerintahan dan konstelasi politik yang ada. Apalagi, pembatasan kajian yang terfokus pada era tahun 1990-1996 membuat karya ini mempunyai pembatas jelas terhadap karya lain khususnya karya Asvi di atas.

Yohanes S Widada dkk dalam buku *Revolusi Politik Kaum Muda*, menyebutkan bahwa bagaimana Orde Baru melakukan proses konsolidasi politik untuk mewujudkan ‘stabilitas politik dan keamanan negara’ (Widada dkk, 2008:121). Proses konsolidasi politik Orde Baru tidak hanya terbatas pada bidang militer belaka. Menurutnya, paket stabilitas politik Orde Baru diwujudkan dalam beragam proyek konsolidasi politik yang meliputi: 1) Konsolidasi ideology; 2) Konsolidasi sistem kepartaian; 3) Depolitisasi massa; 4) Konsolidasi teknokrat, insinyur, dan birokrat nasionalis; 5)Konsolidasi birokrasi; 6)Konsolidasi ormas, LSM, dan gerakan mahasiswa; 7) Konsolidasi pers.

Berbeda dengan Yohanes S Widada dan kawan-kawan dalam melihat Orde Baru. Kajian skripsi ini melihat konsep suksesnya pemerintahan Orde Baru sebagai acuan untuk memperoleh pandangan baru terkait fenomena-fenomena politik yang sedang terjadi pada era 1990an. Sebab, setiap fenomena politik menjadi penting untuk dianalisis karena era itulah cikal bakal pemerintahan Orde Baru mulai runtuh. Sedangkan untuk konsolidasi politik, kajian skripsi ini lebih menekankan pada tingkat analisis dinamika politik

Orde Baru dalam kondisi genting, yakni pada tahun 1990-1996. Perubahan atmosfer politik pada tahun 1990-an membutuhkan penyikapan politik yang berbeda dari rezim Suharto apabila ingin mempertahankan kekuasaannya. Oleh karenanya, kajian terkait konsolidasi politik Orde Baru pada tahun 1990-an juga menjadi penting untuk dilakukan.

Ada beberapa macam kerangka teori yang digunakan untuk melakukan kajian ini. hal itu disebabkan kompleksitas rezim Orde Baru yang menuntut setiap kajian mengenai rezim ini untuk melihatnya dari berbagai macam sudut pandang. Banyak khalayak umum menilai bahwa rezim Suharto lebih menerapkan sistem pemerintahan otoriter bukannya demokrasi. Akan tetapi bila dilihat dengan seksama, otoritarianisme Orde Baru dijalankan rapi dengan bungkus demokrasi, sehingga menjadikan itu sebagai apa yang disebut Arief Budiman dengan konsep “demokrasi pinjaman” (Budiman, 1996:36). Akhirnya, presiden Suharto yang diktator dapat berkuasa dengan langgeng, karena Suharto dapat meyakinkan rakyat bahwa demokrasi hanya akan menghambat pembangunan ekonomi. Dengan demikian, dekrit-dekrit yang menghambat kebebasan pers, atau pembatasan terhadap kehidupan partai politik, dapat diterima oleh masyarakat kebanyakan.

Teori Elit Kekuasaan yang dikeluarkan oleh C. Wright Mills juga sinkron dengan fenomena munculnya golongan sama yang selalu menguasai Orde Baru. Teori ini pada dasarnya mengatakan bahwa meskipun masyarakat terdiri dari bermacam kelompok yang pluralis, tetapi dalam kenyataannya kelompok elit penguasa datang dari satu kelompok masyarakat tertentu (Nugroho D, 2006:59). Secara hukum, semua orang memang bisa menempati jabatan negara, jabatan militer atau posisi bisnis kelas atas. Tetapi dalam kenyataannya, jabatan-jabatan itu diduduki oleh orang-orang dari kelompok tertentu tersebut.

Penelitian ini juga tidak meninggalkan faktor penting dari rezim Orde Baru yang disebut dengan legitimasi politik. Antonio Gramsci dengan teori hegemoni menjelaskan mengenai bagaimana suatu kekuasaan negara dapat bertahan dan tumbuh subur dalam rezimnya. Kekuasaan hegemoni pada dasarnya merupakan kekuasaan dari satu kelompok masyarakat yang diterima atau

dianggap sah oleh kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Menurut Gramsci, dengan *hegemoni* atau menguasai dengan “kepemimpinan moral dan intelektual” secara konsensual, kekuasaan dalam suatu negara dapat berjalan secara abadi.

Teori Negara Otoriter Birokratis Rente dijadikan pisau analisis Arief Budiman untuk melihat Orde Baru dibawah kepemimpinan Suharto. Budiman menyebutkan bahwa bentuk negara yang dibangun oleh Suharto dengan dalih pembangunan ekonomi telah melahirkan bentuk negara yang otoriter dan ditentukan oleh segelintir golongan birokrat yang hanya memikirkan rente atau upah (Budiman, 1991:59).

## 2. Metode Penelitian

Metode sejarah menurut Louis Gottschalk adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis terhadap peninggalan masa lampau (Gottschalk, 1975:32). Metode penelitian sejarah terdiri atas empat tahap (heuristik, kritik sumber, interpretasi, historiografi). Sumber yang digunakan pada tulisan ini adalah sumber pustaka, mengingat akan kajian penulis dalam konteks kebijakan nasional yang terkandung dalam strategi-strategi politik rezim Orde Baru serta implikasinya terhadap kondisi politik nasional, maka idealnya penulis memakai sumber pustaka yang diperoleh dari Perpustakaan Nasional RI, Perpustakaan Pusat UNEJ, dan Perpustakaan Fakultas Sastra. Selain itu juga sumber penulisan skripsi ini diperoleh dari jaringan internet melalui terbitan-terbitan koran Tempo tahun 1990-an serta foto-foto koleksi Tempo dalam situ resminya. Setelah data terkumpul, kemudian dikritik dengan membandingkan data yang satu dengan data yang lain dengan mempertimbangkan aspek validitas data, misalnya buku karangan O. G. Roeder *Soeharto dari Pradjurit Sampai Presiden* yang menceritakan biografi Suharto pada mulai jadi prajurit Angkatan Darat sampai era awal Suharto memerintah, dibandingkan oleh penulis dengan buku karangan Eros Djarot dan kawan-kawan dengan judul *Siapakah Sebenarnya Soeharto Fakta dan Kesaksian Para Pelaku Sejarah G 30 S/PKI* yang lebih memaparkan fakta melalui kesaksian pelaku sejarah menyangkut era 1965 disaat Suharto melakukan strategi politiknya. Sumber-sumber yang telah disaring tersebut

kemudian ditasirkan melalui interpretasi terhadap fakta-fakta sejarah. Fakta ini kemudian disusun menjadi sebuah konstruksi suatu peristiwa yang utuh. Pada tahap ini peran teori dan metode pendekatan berfungsi sebagai alat untuk menganalisis sekaligus menjelaskan peristiwa. Langkah terakhir adalah historiografi, yakni penulisan sejarah berdasarkan hasil dari tahapan sebelumnya dengan menggunakan kaedah 5 W 1 H (what, why, where, when, who dan how), sehingga diperoleh penulisan sejarah yang deskriptif analitis.

## 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Selain adanya kekuatan konfigurasi politik Orde Baru yang kuat, berlangsungnya rezim ini juga ditunjang oleh seperangkat struktur ide yang ada. Orde Baru memanfaatkan beberapa struktur ide untuk melegitimasi setiap gerakan politiknya, sehingga meskipun gerakan politik rezim ini bertentangan dengan kemaslahatan bersama, tetapi rakyat tetap dapat ‘menerima’. Struktur ide tersebut diantaranya adalah, konsep negara integralistik, developmentalisme, Dwi Fungsi ABRI, monopoli penafsiran Pancasila, anti komunisme dan pengkambinghitaman demokrasi.

Setiap perangkat ide tersebut diatas menjadi sangat ampuh dijadikan rezim Orde Baru untuk mendukung rezim ini tetap bertahan. Dengan bekal seperti itu, tidak luput ekses yang ditimbulkan adalah tindak kekerasan, intimidasi dan bahkan korban jiwa sebagai pewarna dinamika politik yang diakibatkan rezim ini. Asvi Warman Adam (2010:37) menggolongkan ada sepuluh pelanggaran HAM berat dalam periode 1945-1998 yang meliputi: 1) Ekses Demokrasi Terpimpin (antara lain penahanan tokoh Masyumi/PSI tanpa diadili); 2) Pembantaian 1965/1966; 3) Penahanan politik di kamp Pulau Buru (1969-1979); 4) Kasus Timor-Timur (serangan 7 Desember 1975); 5) Kasus Aceh; 6) Kasus Irian Jaya; 7) Penembak Misterius (Petrus); 8) Kasus Tanjung Priok 1984; 9) 27 Juli 1996; 10) Seputar kerusuhan Mei 1998.

Dari sepuluh kategori yang disebutkan di atas, hanya satu yang terjadi pada era Orde Lama, sembilan kasus lainnya terjadi pada era Orde Baru yang dipimpin oleh Suharto. Salah satu yang ditimbulkan dari kondisi demikian adalah sekitar awal tahun 1980an, perkembangan wacana

demokrasi dan hak asasi manusia mulai meluas. Hampir semua golongan prodemokrasi memberikan penghargaan utama terhadap hak asasi manusia. Penekanannya bisa terletak pada hak individu, politik, atau hak sosio ekonomi kolektif, tetapi ada kesepakatan bersama tentang pentingnya penghargaan terhadap hak asasi manusia yang universal. Menurut Buyung Nasution, “ketika hak asasi manusia dibebaskan dari semua perbedaan budaya, agama, aliran politik, kesukuan, maka tinggal intinya saja sehingga namanya basic human rights, misalnya hak untuk hidup, hak menyatakan pikiran dengan lisan atau tulisan” (Kristanto, 2011:81).

Perkembangan wacana demokrasi semacam ini telah mengurat saraf pada kalangan aktivis prodemokrasi khususnya. Konsolidasi rezim Orde Baru terhadap perkembangan demokrasi ternyata mengakibatkan makin besarnya isu dan tuntutan terkait demokratisasi dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Senjata pamungkas rezim untuk menekan gerakan demokrasi (stigma komunisme) ternyata telah usang dimakan perkembangan jaman dan sosial politik di Indonesia. Tuduhan semacam itu atau ideologi anti komunisme telah menjadi kurang berguna bagi rezim. Bahkan, transformasi bentuk demokrasi yang telah mengalahkan komunisme tersebut tidak lagi memiliki saingan ideologis lainnya dan sedang menyebar ke seluruh dunia.

Pada akhir 1980-an dan awal 1990-an, telah lahir sejumlah LSM baru yang radikal dan vokal dengan tokoh-tokoh diantaranya Indro Tjahyono, Bambang Beathor Surjadi, Nuku Soleiman dan lain-lain yang fokus secara khusus pada demokrasi dan hak asasi manusia. Generasi baru LSM prodemokrasi dan hak asasi manusia ini misalnya Infight, PIJAR, Geni, Lapera, LBH Nusantara, Yayasan Maju Bersama, PIPHAM, Yayasan Perempuan Bebas, Rumpun, Lekhat, Partai Rakyat Demokratis, dan Aledra (Uhlir, 1998:135).

Secara garis besar, generasi baru LSM-LSM prodemokrasi dan hak asasi manusia ini telah membantu menempatkan perjuangan demi demokrasi dengan kukuh pada agenda perjuangan di Indonesia. Kritisisme mereka yang lantang terhadap rezim yang berkuasa telah membuat takut golongan elit penguasa. Akan tetapi, bila disimak lebih lanjut bahwa organisasi-organisasi

ini tidak membuat suatu kekuatan politik yang kukuh untuk demokrasi, mereka tidak merencanakan strategi jangka panjang untuk demokrasi. Namun demikian, terdapat suatu pola kerjasama yang baik dari setiap organisasi ini, mereka bersatu padu untuk menegakkan demokrasi di Indonesia melalui kampanye-kampanye yang telah mereka lakukan.

Berjalannya kekuasaan Orde Baru tidak terlepas dari faktor hegemoni yang luar biasa oleh rezim. Bahkan hegemoni rezim selayaknya sudah dapat digolongkan sebagai hegemoni yang terlembagakan dalam pemerintahan. Oleh karena itu, terkait masa depan suksesi Indonesia terhadap Orde Baru, sebenarnya sebagian tergantung pada sejauh mana rezim Orde Baru telah terlembagakan. Banyak pro dan kontra dalam menanggapi pertanyaan besar tersebut. Robison menjelaskan mengenai format politik Orde Baru yang tidak bisa terwariskan dengan sendirinya. Ia mengatakan bahwa :

“Basis sesungguhnya dari kekuasaan Suharto adalah susunan institusional dan aliansi politik yang telah dibangun [...] inilah elemen kekuasaan yang tidak akan secara otomatis terpindahkan pada penggantinya [...] sebab kekuasaan Suharto tersusun terutama dari jaringan persekutuan politik dan ekonomi, system patronase, dan sumber keuangan yang tidak dianugrahan oleh kekuasaan kontitusional formal presiden, siapapun yang menggantikannya hanya akan mewarisi sebagian dari kekuasaan politik sejatinya. Oleh karena itu, tampaknya tidak mungkin bahwa konfigurasi kekuasaan akan tetap sama. Aliansi baru yang didalamnya posisi presiden menjadi kurang dominan dan lebih bertanggung jawab adalah mungkin” (Haris, : 1996:139).

Pernyataan Robison tersebut dapat menggambarkan sifat kompleks dari kekuasaan yang telah dibangun Suharto dan itu tidak dengan mudah dapat diwariskan kepada penggantinya nanti. Akan tetapi untuk memprediksikan ke depan tentang jenis politik seperti apa yang akan lahir setelah Suharto lengser ataupun meninggal dunia, maka harus melihat dengan seksama pada perkembangan di dalam tubuh aktor utama kedua

dalam politik Orde Baru yakni Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

Melihat lebih luas, perpecahan dalam tubuh ABRI ternyata telah dikenal terbagi menjadi dua golongan. Pertama dikenal dengan golongan "ABRI Hijau dan ABRI Merah Putih". Seperti apa yang diungkapkan dalam dokumen CPDS (Centre for Policy Development Studies). Pada awal tahun 1990-an, kemajuan bidang teknologi ternyata membawa dampak yang signifikan untuk perkembangan masyarakat secara umum. Dokumen ini diterbitkan oleh Jurnal Istiqlal melalui internet dengan membawa informasi pemetaan kekuatan-kekuatan yang dianggap bersebrangan dengan Suharto. Dalam dokumen tersebut juga dimunculkan nama-nama analisisnya seperti Dr. Amir Santoso, Dr. Dien Sjamsuddin, Muchlis Anwar, Lukman Hurun dan Robik Mukav. Analisis dalam dokumen tersebut dimulai dengan membagi dua pengelompokan besar yaitu kelompok yang anti Suharto dan kelompok yang pro terhadap Suharto. Begitu pula dalam jajaran militer, seperti apa yang disebut dalam dokumen CPDS tersebut adalah :

"Pada tubuh militer disebutkan adanya kelompok Perwira Tinggi ABRI yang sedang mengumpulkan kekuatan dan strategi untuk mendapatkan kekuasaan. Kelompok tersebut dipimpin oleh Letjen Wiranto (Komunitas Informasi Terbuka, 1998:1). Beberapa nama yang tergolong dalam kelompok ini antara lain Bimo Prakoso (Akabri 1968), Agus Wijoyo (Akabri 1970), dan Susilo Bambang Yudoyono (Akabri 1973). Untuk Susilo Bambang Yudoyono (menantu Sarwo Edhi) sendiri dikatakan mempunyai kelompok perwira lainnya, antara lain : Agus Wirahadikusuma, Agus Wijoyo (menantu tokoh PNI Isnaeni) dan sejumlah perwira yang memperoleh gelar MA dari universitas-universitas di AS. Kelompok ini disebutkan mempunyai kedekatan dengan tokoh sipil seperti Dr. Syahrir dan dikatakan dengan Benny Moerdani yang bisa mengarahkan mereka dari belakang. Kelompok ini dikatakan menyebut dirinya sebagai "ABRI Merah Putih". Lawan mereka dijuluki sebagai "ABRI Hijau" dibawah pimpinan Hartono dan Prabowo" (Jusuf dkk, 2007:37).

Jika dilihat dengan seksama, terjadinya konflik dalam tubuh ABRI / AD tersebut bukanlah terdapat dalam permasalahan ABRI itu sendiri, melainkan sentral dari konflik itu sesungguhnya berasal pada Suharto sebagai presiden, penguasa tertinggi sipil dan militer. Semua kelompok maupun individu cenderung berupaya mendekati diri dengan Suharto atau lingkaran-lingkaran terdekatnya untuk memenangkan rivalitas mereka. Jadi pada dasarnya adalah kondisi 'cari muka' dengan mengandalkan kedekatan dengan Presiden Suharto merupakan kunci dari setiap perpecahan yang telah terjadi.

Di balik perpecahan yang sedang berlangsung dalam tubuh ABRI (Angkatan Darat) yang selama ini menjadi salah satu kunci keberhasilan Orde Baru menjalankan status quonya, di luar sisi dalam konstalasi politik nasional pada aspek pers Indonesia juga telah berlangsung dinamika politik yang cukup menarik. Tepatnya pada 21 Juni 1994, majalah Tempo, Editor dan tabloid DeTIK ditutup secara paksa oleh pemerintah. Untuk majalah Tempo, keputusan pembatalan SIUPP oleh Menteri Penerangan Harmoko dengan Surat Keputusan Nomor 123/KEP/MENPEN/1994 dilakukan karena Tempo dianggap melalui pemberitaannya tentang pembelian kapal perang eks Jerman Timur, terutama soal penyediaan dananya, telah mengganggu stabilitas nasional dan tidak menyelenggarakan kehidupan Pers Pancasila yang sehat dan bertanggung jawab. Sedangkan untuk Editor dan Detik, mereka diberedel karena menurut pemerintah, keduanya melakukan pelanggaran administratif SIUPP (Prambadi dkk, 1994:43).

Serentetan aksipun kerap dilakukan oleh berbagai kalangan oposisi terhadap pemerintahan Orde Baru. Gerakan protes tidak hanya terbatas pada kalangan media massa dan wartawan, akan tetapi golongan prodeokrasi dan hak asasi manusia seperti Adnan Buyung Nasution, golongan seniman seperti W.S. Rendra juga ikut meramalkan aksi protes tersebut. Berdasarkan serentetan aksi yang telah terjadi, maka sampailah aksi protes tersebut pada hari Senin tanggal 27 Juni 1994 yang dikenal dengan "Tragedi Jakarta Berdarah". Peristiwa kekerasan yang dilakukan sekumpulan tentara dengan memakai kaos oblong bertuliskan "Ops Bersih" dan memakai celana

doreng tentara lengkap dengan pemukul rotan dan tameng tersebut menunjukkan wajah politik yang ironis terhadap Negara ini.

Adanya agenda-agenda tertentu dibalik berbagai konflik dalam peristiwa besar, khususnya terhadap organisasi yang berbasis massa besar, semakin terlihat dalam konflik yang terjadi pada tubuh Partai Demokrasi Indoneisa (PDI). Disaat konflik di tubuh PDI memasuki fase awal dalam perjalannya, bersamaan pula dengan mulai meningkatnya konflik di tubuh NU yang sebelumnya sangat panas terkait naiknya kembali Gus Dur yang tidak disukai Suharto sebagai Ketua Umum NU. Berselang meredanya konflik di tubuh NU, berangsur-angsur konflik di tubuh PDI menjadi lebih meningkat dan mulai memasuki puncaknya.

Puncak konflik PDI akhirnya melahirkan “Peristiwa 27 Juli 1996”, yang diawali dengan perebutan kantor DPP PDI oleh kubu Soerdjadi hasil Kongres Medan. Kelompok massa dengan mengenakan atribut “Pro Kongres” melakukan penyerbuan pada dini hari tanggal 27 Juli di bawah pimpinan Buttu Hutapea. Penyerbuan tersebut mendapat dukungan dari aparat keamanan dengan melakukan perlindungan terhadap kelompok penyerbu dari kelompok massa pro Mega yang berada di luar kantor DPP. Selanjutnya gerakan tersebut berkembang menjadi konflik fisik dan aksi perusakan. Aksi kekerasan, pembakaranpun terjadi disekitar Jl. Diponegoro dan Jl. Salemba hingga Jl. Matraman Jakarta. Setidaknya beberapa pertokoan, kantor pemerintah, gedung (gedung Persit Kartika Chandra), bank dan beberapa bangunan lain serta dua bis dirusak dan dibakar massa. Setelah peristiwa berdarah tersebut usai, tidak dapat dipungkiri bahwa banyak jatuh korban dari berbagai pihak (lihat tabel Data Korban Kerusuhan 27 Juli 1996).

**Tabel**  
**Data Korban Kerusuhan 27 Juli 1996**

No	Jenis Kasus	Jumlah Korban	Keterangan
1	Meninggal	5 Orang	Korban Meninggal masing-masing bernama: Asmadi Sholeh (meninggal

			karena kekerasan benda tumpul), Suganda Siagian (meninggal karena luka bakar), Slamet (meninggal karena kekerasan benda tumpul), Uji bin Atep (meninggl karena serangan jantung), Sariwan (meninggal karena serangan jantung).
2	Luka-luka	149 Orang	Jumlah korban luka-luka baik dari sipil maupun militer.
3	Hilang	23 Orang	Istilah hilang dapat diartikan belum pulang kerumah asal, tidak dapat dihubungkan dalam perjalanan atau kemungkinan meninggal.
4	Di tahan	136 Orang	Jumlah tahanan tersebut per 12 Oktober belum diperoleh dari instansi penyidik.

*Sumber: Data Komnas HAM selama pemantauan mulai tanggal 28 Juli 1996.*

Dampak dari peristiwa 27 Juli 1996 tidak hanya dirasakan oleh kubu PDI kubu Soerdjadi dan kubu Megawati, tetapi juga merembet ke berbagai kalangan lain. Seperti halnya Organisasi Partai Rakyat Demokratik (PRD) dituduh menyusup dalam tubuh PDI dan dianggap sebagai kelompok berbau komunis dan mendalangi peristiwa 27 Juli. Kemudian munculah pelarangan secara formal oleh pemerintah terhadap organisasi ini. Dalam setiap gerakannya tersebut, pemerintah selalu memakai tuduhan OTB untuk melegitimasi setiap tindakannya.

Suasana politik yang semakin memanas pada era 1990-an ternyata telah mengakibatkan eksekusi yang sangat terasa bagi golongan-golongan yang pro terhadap demokrasi dan bahkan

golongan lain juga terkena dampak negatifnya. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan jaman dan kemajuan lainnya, ternyata pilihan strategi politik rezim Orde Baru yang masih tetap hampir sama dengan dulu era awal terbentuknya, ternyata sudah kurang relevan lagi. Buktinya terdapat pada bukan makin berkurangnya gerakan oposisi terhadap rezim melainkan makin besarnya gerakan prodemokrasi dan anti Suharto seiring dengan pilihan strategi politik yang telah dilakukan oleh Orde Baru pada era 1990-an.

#### 4. Kesimpulan dan Saran

Pada awal tahun 1990-an, Orde Baru menghadapi tuntutan demokratisasi yang sangat besar dari berbagai macam kalangan. Isu yang menjadi tren untuk bergerak pada era itu adalah mengenai hak asasi manusia dan demokrasi. Pada era itu, sebagai wajah dari gerakan prodemokrasi yang ada di Indonesia, telah banyak lahir generasi baru LSM hak asasi manusia dan demokrasi yang berjuang dengan gigih menyuarakan tuntutan tentang hak asasi manusia dan demokrasi yang dianggapnya bersifat universal.

Contoh gerakan tersebut dapat dilihat salah satunya dalam kasus pembredelan Tempo, Editor dan DeTIK. Pembredelan itu ternyata bukan melemahkan kekuatan oposisi, tetapi malah memperkuat solidaritas gerakan tersebut. Menyusul pencabutan SIUPP tiga majalah tersebut, banyak terjadi gelombang protes yang dilakukan, diantaranya adalah berdirinya organisasi Solidaritas Indonesia Untuk Pemberedelan Pers (SIUPP) yang mengkordinir banyak pertemuan dengan organisasi prodemokrasi dan hak asasi manusia lainnya seperti LPHAM, Infight, FAMI, Pijar dan lain sebagainya. Gelombang demonstrasi juga meningkat dengan pesat yang bukan hanya diikuti oleh wartawan yang bersangkutan, tapi juga tokoh-tokoh prodemokrasi dan hak asasi manusia juga ikut didalamnya, diantaranya Adnan Buyung Nasution dan bahkan WS, Rendra seorang seniman juga ikut turun.

Munculnya Megawati Sukarno Putri dalam panggung politik Indonesia dengan fenomena disingkirkannya dari tubuh PDI, menjadikan banyak anggapan bahwa kondisi politik ke depan kehilangan secercah cahaya harapannya. Figur Megawati sangat populis pada tataran basis, sosoknya yang diidentikkan dengan

mantan presiden Sukarno membuat gerakan massa dan aktivis prodemokrasi memiliki kekuatan tersendiri.

Suharto bersama sekutunya ternyata tidak mampu untuk mengakomodasi perkembangan situasi politik yang baru ini. Oleh karena itu, Suharto dan militer tetap menggunakan satu-satunya metode yang mulai dulu mereka anggap tepat dalam proses konsolidasinya, yaitu penindasan dan kekerasan. Penyerbuan terhadap kantor pusat PDI dan penghancuran gerakan oposisi dengan penangkapan besar-besaran anggota PRD dan organisasi bawahannya, merupakan pukulan keras bagi gerakan prodemokrasi yang baru saja bersatu. Dengan pengkambing hitaman PRD sebagai kelompok demokrasi radikal dan golongan komunisme membuat pemerintah berharap bisa mencegah gerakan kelompok para oposisi. Sepertinya terlihat dengan jelas bahwa taktik tersebut tidak berhasil. Banyak tujuan umum yang dimiliki para golongan oposisi yang dapat mempersatukan mereka, bahkan tindakan represif tersebut dapat tambah memperkuat akan adanya musuh bersama yang harus ditumpas.

Tulisan ini selayaknya tidak lepas dari kekurangan yang ada didalamnya. Oleh karenanya, sebagai penulis memberikan beberapa saran terkait tulisan yang telah jadi ini. Keterbatasan tulisan yang tidak menyentuh ranah pendekatan sosiologi membuat tulisan ini memiliki kekurangan. Padahal bila dilihat dengan seksama, salah satu keberhasilan reformasi Indonesia tahun 1998 tidak lepas dari perubahan struktur sosial masyarakat Indonesia dalam menyambut gelombang demokrasi yang datang. Jadi diharapkan demi pengembangan tulisan yang sejenis, keberagaman pendekatan supaya dipertimbangkan demi terciptanya penulisan sejarah yang lebih baik dan analitis.

#### Daftar Pustaka/Rujukan

##### Buku dan Artikel

Arief Budiman. 1991. *Negara dan Pembangunan Studi Tentang Indonesia dan Korea Selatan*. Jakarta: Yayasan Padi dan Kapas.

- 1996. 1996. *Teori Negara, Negara Kekuasaan dan Ideologi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Anders Uhlin. 1998. *Oposisi Berserak*, Penerjemah Rofik Suhud. Bandung: Penerbit Mizan.
- Asvi Warman Adam. 2010. *Menguak Misteri Sejarah*. Jakarta: Kompas.
- Didi Prambadi dkk., 1994. *Buku Putih Tempo: Pemberedelan itu*. Jakarta: Alumni Majalah Tempo.
- Ester Indahyani Jusuf dkk., 2007. *Kerusuhan Mei 1998 Fakta, Data dan Analisa*. Jakarta: Solidaritas Nusa Bangsa (SNB).
- Frank Friedel. 1991. *Konflik dan Konsensus dalam Sejarah Amerika Modern*.
- Louis Gottschalk. 1975. *Mengerti Sejarah*. (Terj.) Nugroho Notosusanto. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.
- Riwanto Tirtosudarmo. 2010. *Mencari Indonesia 2*. Jakarta : LIPI Prees.
- Riant Nugroho D. 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: Gramedia.
- Syamsudin Haris (Editor). 1996. *Menelaah Kembali Format Politik Orde Baru*. Jakarta: PPW-LIPI dan Gramedia Pustaka Utama.
- Tri Agung Kristanto editor. 2011. *Pikiran dan Gagasan Demokrasi Konstitusional Adnan Buyung Nasution*. Jakarta: PT Kompas Nusantara.
- Yohanes S Widada dkk. 2008. *Revolusi Politik Kaum Muda*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

### **Internet**

“Konflik ABRI Tak Kunjung Usai”, [Online] United Kingdom, Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka, diunduh pada tanggal 15 April 2013.